

ANALISIS TUGAS 2 TUGAS PPKN

A. SISTEM ETIKA PERILAKU POLITIK SAAT INI DAN KESESUAIANNYA DENGAN NILAI PANCASILA

Sistem etika perilaku politik di Indonesia secara formal dan ideal berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai sumber etika politik dan norma moral bagi seluruh penyelenggara negara dan warga negara. Kesesuaian dengan Nilai-nilai Pancasila

Secara *yuridis-formal* dan *konseptual*, sistem etika perilaku politik sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Setiap sila Pancasila memberikan landasan moral yang mengatur kehidupan politik:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa: Menuntut adanya moralitas dalam berpolitik, menghindari kecurangan, dan mengedepankan tanggung jawab spiritual dan moral kepada Tuhan.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Mendorong kebijakan yang adil, menghormati hak asasi manusia, dan menjunjung tinggi adab (berakhlak) dalam kepemimpinan dan pembuatan kebijakan.
3. Persatuan Indonesia: Mengharuskan setiap tindakan politik menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Menjaga kerukunan dan persatuan.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Mendorong proses politik yang demokratis, mengedepankan musyawarah mufakat, dan menghindari pemaksaan kehendak.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Menekankan bahwa tujuan utama politik adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat, serta menghindari eksploitasi dan kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Namun Tantangan dan Kenyataan (Belum Sepenuhnya Sesuai)

Sistem etika perilaku politik di Indonesia saat ini masih mengalami berbagai tantangan dan belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Banyak praktik politik yang masih didominasi oleh kepentingan pribadi, kelompok, dan pragmatisme, sehingga nilai-nilai moral, kejujuran, dan keadilan sering terabaikan. Di sisi lain, etika generasi muda di sekitar lingkungan juga mengalami dekadensi moral, terlihat dari perilaku yang kurang menghormati norma, tawuran, bullying, dan kurangnya rasa tanggung jawab sosial. Secara *aktual* di lapangan, implementasi etika politik seringkali belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Terdapat beberapa tantangan serius yang menunjukkan adanya penyimpangan, antara lain:

- Maraknya Korupsi dan Politik Uang: Merupakan pengkhianatan terhadap sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan Keadilan Sosial, karena merugikan keuangan negara dan hak-hak rakyat.
- Intoleransi dan Fanatisme SARA: Bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa (toleransi beragama) dan Persatuan Indonesia, yang seharusnya menjunjung tinggi kerukunan dan persatuan bangsa yang majemuk.
- Penyebaran Hoaks dan Disinformasi: Merusak prinsip Kerakyatan yang mengedepankan musyawarah berdasarkan hikmat kebijaksanaan (rasional dan bermartabat).
- Penegakan Hukum yang Lemah dan Tidak Konsisten: Menyimpang dari sila Keadilan Sosial dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena keadilan tidak ditegakkan secara merata tanpa pandang bulu.

Meskipun ada upaya untuk memperkuat etika politik melalui peraturan perundang-undangan dan pendidikan politik, implementasinya masih lemah. Budaya malu dan tanggung jawab moral yang seharusnya menjadi dasar politik Pancasila belum sepenuhnya diwujudkan. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat kesadaran moral dan etika di kalangan pelaku politik, serta memperkuat pengawasan dan penegakan hukum agar politik di Indonesia benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

B. ETIKA GENERASI MUDA DAN DEKADENSI MORAL

Etika generasi muda di Indonesia saat ini mengalami dekadensi moral yang cukup serius. Banyak remaja yang kurang menghormati norma sosial, melakukan tawuran, bullying, dan kurang memiliki rasa tanggung jawab sosial. Faktor penyebabnya antara lain lemahnya pembinaan karakter sejak usia dini, pengaruh teknologi dan media sosial yang tidak terfilter, serta kurangnya pendidikan moral di sekolah dan keluarga. Akibatnya, generasi muda sering terjerumus dalam perilaku menyimpang dan kurang memiliki dasar moral yang kuat.

Dekadensi moral ini berdampak luas terhadap kehidupan berbangsa. Pada tingkat individu, hilangnya nilai moral dapat memicu perilaku menyimpang dan merugikan orang lain. Pada tingkat sosial, dekadensi moral melemahkan solidaritas, memperbesar kesenjangan, dan memicu konflik horizontal. Pada tingkat negara, moral yang merosot dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga, melemahkan supremasi hukum, dan mengancam persatuan nasional. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan daya saing bangsa karena generasi muda kehilangan arah dan integritas.

Solusi Mengatasi Dekadensi Moral

Untuk mengatasi dekadensi moral yang terjadi pada generasi muda, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pendidikan karakter harus diperkuat di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sekolah dapat mengimplementasikan pendidikan karakter melalui

kurikulum yang menekankan nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Keluarga juga berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai moral sejak dini, serta memberikan contoh perilaku yang baik. Masyarakat dapat berperan melalui kegiatan sosial, bimbingan, dan kepedulian terhadap generasi muda. Selain itu, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung pembentukan karakter generasi muda. Program-program seperti bimbingan moral, kegiatan sosial, dan kampanye anti-bullying dapat membantu mengatasi degradasi moral. Generasi muda juga perlu dilibatkan secara aktif dalam membangun budaya etika yang positif, serta diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

Dengan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan, diharapkan generasi muda Indonesia dapat kembali mencerminkan etika dan nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia, serta menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat.